

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Pada bab ini memuat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memuat sebuah konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Table 2.1 Tinjauan Literatur

NO	Judul	Penulis	Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Konflik Israel-Palestina Tak Kunjung Selesai: Sebuah Penilaian Kritis	Fadhila Inas Pratiwi, M. Aryo Rasil Syarafi, Demas Nauvarian . 2022	Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Demas Nauvarian dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Demas Nauvarian berfokus pada rencana Presiden Trump dan PM Netanyahu dalam konferensi pers, meluncurkan Rencana Perdamaian untuk Kemakmuran. Sedangkan penulis berfokus kepada keterlibatan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Demas Nauvarian dan penulis adalah sama-sama membahas kebijakan aktor dalam menangani konflik IsraelPalestina.

2.	Kampanye Palestina melawan Israel di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa	Eytan Gilboa. 2021		Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eytan Gilboa dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eytan Gilboa cenderung membela Israel dan menyatakan 85 bahwa Israel adalah korban kekerasan dan kekejian Palestina. Sedangkan penulis meyakini bahwa Palestina adalah korban kekerasan dan kekejian Israel.	persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eytan Gilboa dan penulis adalah sama-sama membahas salah satu badan utama Perserikatan Bangsa-bangsa
3.	Opini Publik Australia tentang Konflik Israel-Palestina: Implikasinya dalam Konteks Revolusi Arab	Eulalia Han dan Halim Rane. 2014	Australia Journal of Political Science	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eulalia Han dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eulalia Han membahas mengenai kebijakan dan resolusi yang dikeluarkan oleh	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eulalia Han dan penulis adalah sama-sama membahas resolusi dan kebijakan dalam menagani konflik Israel-Palestina.

				<p>pemerintahan Australia terhadap konflik IsraelPalestina. Sedangkan penulis berfokus kepada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsabangsa dalam Menagani Konflik Israel- Palestina.</p>	
--	--	--	--	---	--

4.	Dukungan untuk Palestina di Kalangan Muslim Indonesia: Identitas Agama dan Solidaritas sebagai Alasan Penandatanganan Petisi Elektronik	Muhammad Abdan Shadiqi, Hamdi Muluk, dan Mirra Noor Milla. 2020	Psychological Research on Urban Society	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hamdi Muluk dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan Hamdi Muluk lebih berfokus membahas resolusi dan dukungan masyarakat Indonesia dan Amnesty International Indonesia terhadap Palestina. Sedangkan penulis berfokus pada resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam menangani konflik Israel-Palestina.	Persamaan peneliti Hamdi Muluk dan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai dukungan dan resolusi demi terciptanya perdamaian di Palestina dan konflik Israel-Palestina ini dapat terselesaikan.
5.	Siapa yang membutuhkan Hipotesis Perempuan dan Perdamaian? Memikirkan	Sarai B. Aharoni. 2016	International Feminist Journal of Politics	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sarai B. Aharoni dan penulis yaitu penelitian yang	persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sarai B. Aharoni dan penulis adalah sama-

	kembali cara-cara penyelidikan tentang gender dan konflik di Israel/Palestina			dilakukan oleh Sarai B. Aharoni berfokus keterlibatan perempuan dalam persoalan perdamaian sebagai warga negara atau warga sipil dalam aktivis perdamaian, dan negosiator perdamaian di Israel dan Palestina. Sedangkan penulis berfokus kepada keterlibatan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa Dalam Menangani Konflik Israel dan Palestina	sama membahas dampak dan sejarah konflik Israel-Palestina.
6.	Kekerasan dan Pembangunan Negara dalam Konteks Konflik Perbatasan: Sebuah Studi tentang Konflik Israel-Palestina	Aide Esu. 2015	Journal of Intervention and Statebuilding	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aide Esu dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aide Esu berfokus pada kekerasan dan pembangunan	persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aide Es dan penulis adalah sama-sama membahas dampak yang ditimbulkan

				<p>negara dalam Konflik IsraelPalestina</p> <p>Sedangkan penulis berfokus kepada resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa Dalam Menagani Konflik Israel dan Palestina.</p>	<p>konflik Israel-Palestina.</p>
7.	<p>Pembingkaiian Pemberitaan Konflik Palestina-Israel di CNN dan FoxNews</p>	<p>Suzan Alkalliny, 2017</p>	<p>Internati onal Journal of English Literatur e and Social Sciences</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suzan Alkalliny dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suzan Alkalliny berfokus membahas mengenai penggunaan media CNN dan Fox News dalam menyampaikan berita mengenai konflik IsraelPalestina.</p> <p>Sedangkan penulis berfokus kepada</p>	<p>Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Suzan Alkalliny dan penulis adalah sama-sama membahas dampak konflik Israel-Palestina dan dampak konflik Israel-palestina.</p>

				keterlibatan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Menangani Konflik Israel dan Palestina.	
--	--	--	--	--	--

Penelitian terdahulu pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fadhila Inas Pratiwi, M. Aryo Rasil Syarafi, Demas Nauvarian yang berjudul **“Konflik Israel-Palestina Tak Kunjung Selesai: Sebuah Penilaian Kritis”** penelitian ini di terbitkan pada tahun 2022 sebagai “Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik” Penelitian ini menggunakan metodologi induktif dengan metode creatin generalisasi empiris atas berbagai upaya resolusi konflik Israel-Palestina. Penelitian ini menggunakan teori Negosiasi, teori ini memberikan jendela dalam menganalisis dinamika perundingan Israel-Palestina . Pertama, penting untuk memperjelas posisi aktor rasional dalam negosiasi. Seringkali, aktor rasional dalam hubungan internasional, yaitu negara, menempati ruang dua jalur yang menciptakan rasionalitas yang sangat terbatas.

Penelitian ini membahas upaya Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu pada konferensi pers, di Gedung Putih pada tanggal 28 Januari 2020, untuk meluncurkan Rencana Perdamaian untuk Kemakmuran atau dikenal juga dengan Trump Peace Plan. Rencana tersebut, yang digambarkan Gedung Putih sebagai “cetak biru perjanjian perdamaian Israel-Palestina,” mengabaikan kontribusi Palestina dan memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, sehingga mengakui klaim Israel atas kota tersebut. (Pratiwi et al., 2022)

Rencana tersebut, yang dirancang oleh penasihat senior dan menantu Trump, Jared Kushner, pada dasarnya memberi Israel peluang untuk mencaplok wilayah yang disengketakan sambil mendorong Palestina untuk menghentikan aksi militer dan berhenti mendukung terorisme. Hal ini saja sudah menimbulkan banyak masalah, karena pemerintah AS dan Israel telah mengakui Hamas dan Organisasi Pembebasan Palestina sebagai organisasi teroris. Oleh karena itu, rencana tersebut juga mengusulkan agar wilayah Sinai Utara Mesir dijadikan sebagai basis bantuan ekonomi ke Tepi Barat dan Jalur Gaza. Selain itu, rencana tersebut juga mengatur pembentukan koridor ekonomi yang menghubungkan Jalur Gaza dengan seluruh Palestina dan membangun perekonomian yang berpusat pada pariwisata (Pratiwi et al., 2022)

Rencana perdamaian ini diterima dengan baik oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menyebutnya sebagai “hari bersejarah” dan Menteri Pendidikan saat itu, dan kini Perdana Menteri Naftali Bennett telah menyatakan bahwa “kesabaran strategis Israel telah membuahkan hasil” dengan mengumumkan rencana tersebut. Israel juga berencana untuk terus mencaplok wilayah yang terbukti menjadi wilayah Israel dalam rencana tersebut. Hal ini menyebabkan kebangkitan kembali proyek pemukiman karena Israel sangat antusias dengan rencana tersebut. (Pratiwi et al., 2022)

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa beberapa elemen sayap kanan di Israel menganggap rencana tersebut terlalu lunak terhadap Palestina dan mengutuk pengakuan Palestina sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Yahudi. Pada akhirnya, hal ini juga meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya intifada ketiga

seiring meningkatnya ketegangan antara Israel dan Palestina. Pada akhirnya, Amerika Serikat menarik sikapnya terhadap aneksasi Israel, dan mengutuk segala perjanjian mengenai aneksasi Israel dalam waktu dekat (Pratiwi et al., 2022)

Karena kesepakatan tersebut tidak adil bagi Palestina, mereka menolak rencana yang dirancang secara in-absentia oleh perwakilan Palestina. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut perjanjian tersebut sebagai “tampanan abad ini” karena membatalkan perundingan sepihak selama beberapa dekade. Perjanjian tersebut mengurangi kepercayaan terhadap Amerika Serikat sebagai mediator netral dalam perundingan. konflik. Rencana tersebut terbukti sangat bertentangan dengan kepentingan Palestina dan memicu kemarahan di banyak negara Muslim. Hal ini juga memberikan tekanan pada hubungan antara sekutu Amerika di Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, dan Arab Saudi, ketika mereka berjuang untuk mempertahankan hubungan kerja dengan Amerika sambil memenuhi tuntutan rakyat mereka sendiri dengan meningkatkan bantuan mereka ke Palestina (Pratiwi et al., 2022)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Demas Nauvarian dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Demas Nauvarian berfokus pada rencana Presiden Trump dan PM Netanyahu dalam konferensi pers, meluncurkan Rencana Perdamaian untuk Kemakmuran. Sedangkan penulis berfokus kepada keterlibatan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa Dalam Menangani Konflik Israel dan Palestina. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Demas Nauvarian dan penulis adalah sama-sama membahas kebijakan aktor dalam menangani konflik Israel-Palestina.

Penelitian terdahulu kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eytan Eytan Gilboa yang berjudul **“Kampanye Palestina melawan Israel di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa”** penelitian ini di terbitkan pada tahun 2021 Penelitian ini membahas Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menawarkan sarana terbaik untuk melaksanakan strategi ini. Penelitian ini juga mengkaji secara kritis tiga Komite Penyelidikan yang dibentuk UNHRC untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang Israel selama konfrontasi dengan Hamas di Gaza.

Peneliti Eytan Gilboa berpendapat bahwa Negara-negara Arab dan Muslim, Rusia, Tiongkok, dan Gerakan Non-Blok (GNB) telah menggunakan PBB sebagai forum untuk mengisolasi dan menghukum Israel. Peneliti Eytan Gilboa juga menyalahkan Palestina karena tidak pernah berhenti menggunakan kekerasan dan terorisme terhadap Israel (Gilboa, 2021)

Peneliti Eitan Gilboa menjelaskan bahwa Palestina menerapkan strategi smart power terhadap Israel. Meskipun ada perjanjian damai yang membentuk Otoritas Palestina di Tepi Barat dan Gaza, dan penarikan penuh Israel dari Gaza, Palestina tidak pernah berhenti menggunakan kekerasan dan terorisme terhadap Israel. Tujuan strategis mereka adalah penghapusan Israel sebagai negara Yahudi. Sasaran smart power yang mereka miliki adalah sasaran yang sangat “sulit”, dan khususnya, sasaran tersebut sangat membatasi kemampuan Israel untuk mempertahankan diri dari kekerasan. dan “lunak” untuk menjelek-jelekkan Israel

sebagai pelanggar berantai hak asasi manusia dan hukum internasional (Gilboa, 2021)

Bukti-bukti yang disajikan dalam penelitian ini jelas menunjukkan adanya pola diskriminasi sistematis, politisasi dan standar ganda yang konsisten dalam resolusi dan tindakan Dewan Hak Asasi Manusia terkait konflik Palestina-Israel. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menunjuk tiga badan untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di Gaza, namun prasangka dan keberpihakan melekat dalam setiap mandat mereka, sehingga tanggung jawab Israel sudah ditentukan bahkan sebelum penyelidikan dimulai. Rumusan mandat ini tidak etis dan tidak masuk akal karena dua alasan: pertama, mereka menarik kesimpulan yang diharapkan dapat dicapai oleh komite investigasi, dan kedua, mereka mengancam independensi penyidik dengan memberikan tekanan berlebihan pada mereka untuk mencapai kesimpulan tersebut (Gilboa, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Eitan Gilboa menunjukkan bahwa Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Komisi Penyelidikan Internasional menunjukkan ketidakpedulian sepenuhnya terhadap perang berintensitas rendah dan terorisme. Mereka memperlakukan Hamas sebagai aktor yang sah, mengabaikan ideologi dan strategi ekstremisnya, dan meremehkan tanggung jawabnya atas permusuhan, korban jiwa, dan kehancuran di Gaza. Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Pengadilan Kriminal Internasional secara sistematis mengabaikan argumen, keluhan dan bukti Israel, serta penilaian para ahli militer senior dari beberapa negara dengan pengalaman tempur yang signifikan. Semua laporan, resolusi, dan mekanisme investigasi Dewan Hak Asasi Manusia dimotivasi oleh permusuhan

terhadap Israel, bukan kepedulian yang tulus terhadap keadilan dan hak asasi manusia. (Gilboa, 2021)

Pengadilan Kriminal Internasional juga mengalami nasib serupa. Kasus Israel memermalukan dan melemahkan kemampuan badan-badan PBB untuk memerangi pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang. Pendahulu Dewan Hak Asasi Manusia PBB dikritik karena politisasi yang keras dan kebangkrutan moral. Karena lembaga-lembaga ini mempunyai kekurangan yang sama, sudah waktunya bagi PBB untuk membongkar inkarnasinya saat ini, bersama dengan ICC yang tidak berfungsi, dan membangun kembali keduanya sehingga mereka dapat memenuhi misi mulia yang menjadi tujuan mereka diciptakan secara moral dan profesional (Gilboa, 2021)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eytan Gilboa dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eytan Gilboa cenderung membela Israel dan menyatakan bahwa Israel adalah korban kekerasan dan kekejian Palestina. Sedangkan penulis meyakini bahwa Palestina adalah korban kekerasan dan kekejian Israel. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eytan Gilboa dan penulis adalah sama-sama membahas salah satu badan utama Perserikatan Bangsa-bangsa.

Penelitian terdahulu ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eulali Han dan Halim Rane yang berjudul **“Opini Publik Australia tentang Konflik Israel-Palestina: Implikasinya dalam Konteks Revolusi Arab”** penelitian ini di terbitkan pada tahun 2014 sebagai *“Australian Journal of Political Science”* Penelitian ini mengkaji tentang hubungan antara opini publik dan pembuatan

kebijakan luar negeri di Australia dengan mengacu pada temuan survei nasional opini publik Australia mengenai konflik Israel-Palestina.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan Australia secara berturut-turut telah mendukung kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina dan mempertahankan sikap yang konsisten dengan kebijakan AS. Hal ini terutama terlihat dalam pola pemungutan suara di Majelis Umum PBB, di mana Australia secara konsisten memberikan suara bersama Amerika Serikat dan Israel, tidak seperti negara-negara lain di dunia, termasuk Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Misalnya, pada tahun 2004 Australia memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum PBB (A/ES-10/L.18/Rev.1) yang mewajibkan Israel untuk mematuhi pendapat nasihat Mahkamah Internasional untuk menghentikan pembangunan tembok keamanan di Tepi Barat. Pada resolusi ini, hanya Australia, bersama dengan Amerika Serikat, Israel, Mikronesia, Kepulauan Marshall, dan Palau, yang memberikan suara menentang resolusi ini, sementara 150 negara memberikan suara mendukung, termasuk Inggris, Jerman, dan Perancis. (Han & Rane, 2011)

Penelitian ini menunjukkan bahwa opini publik Australia hanya mempunyai pengaruh kecil dalam membentuk kebijakan resmi dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Temuan-temuan ini juga diamini oleh mantan diplomat dan politisi Australia dari kedua partai politik besar Australia yang berargumentasi bahwa opini publik Australia mengenai masalah ini mempunyai dampak yang sangat kecil terhadap politik Australia. (Han & Rane, 2011)

Pemerintah Australia mempertahankan kebijakan mengenai konflik Israel-Palestina yang tidak sejalan dengan pandangan banyak warga Australia. Khususnya, mengenai catatan suara mereka di PBB mengenai isu Palestina, pemerintah Australia bertentangan dengan opini publik. Australia tidak sendirian dalam hal ini, karena pemerintah AS, berbagai negara Eropa, bahkan Israel menilai kebijakan mereka terkait konflik Israel-Palestina bertentangan dengan opini yang berlaku. Dari orang-orang mereka. Studi ini menemukan bahwa mayoritas peserta survei lebih mengidentifikasi narasi Palestina tentang penentuan nasib sendiri dibandingkan narasi Israel tentang pertahanan diri. (Han & Rane, 2011)

Sebagian besar peserta menganggap resolusi konflik penting bagi perdamaian dunia, dan mayoritas mendukung kebijakan luar negeri yang menyerukan negosiasi perdamaian berdasarkan hukum internasional dan hak asasi manusia. Peralihan ke pendekatan hukum internasional dan hak asasi manusia juga tercermin dalam pandangan responden survei mengenai masalah status akhir. Mayoritas peserta mendukung hak kembalinya pengungsi Palestina, menentang permukiman Israel, dan lebih memilih Yerusalem sebagai ibu kota bersama Israel dan Palestina atau berada di bawah perwalian PBB dibandingkan sebagai ibu kota eksklusif kedua belah pihak. (Han & Rane, 2011)

Meskipun pandangan mengenai konflik Israel-Palestina yang diungkapkan dalam survei ini konsisten dengan pandangan publik di negara-negara Barat lainnya, dan jelas bertentangan dengan kebijakan pemerintah masing-masing negara, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa opini publik mengenai konflik Israel-Palestina konflik, Palestina sendiri dapat mendorong pemerintah

Barat, termasuk Australia, untuk mengubah kebijakan mereka yang sudah lama ada. Alasan mengapa kebijakan konflik pemerintah Australia tidak sejalan dengan opini publik memerlukan penyelidikan lebih lanjut. (Han & Rane, 2011)

Artikel ini hanya menunjukkan bahwa kurangnya minat publik terhadap konflik dan terbatasnya media serta advokasi publik terhadap perubahan kebijakan tidak dapat dimaafkan. Bagian penting dari penjelasannya. Namun, perubahan kebijakan mungkin terjadi karena perkembangan lain. Perubahan politik di Timur Tengah dan Afrika Utara, khususnya Mesir, telah mengubah dinamika proses perdamaian. Apa yang merupakan status quo berkelanjutan dalam hal parameter solusi yang dinegosiasikan kini cenderung menjadi kurang layak. Hal ini mendorong Menteri Luar Negeri seperti Kevin Rudd untuk memperluas pembahasan dengan mencakup isu-isu seperti perbatasan tahun 1967 dan kembalinya pengungsi, yang sebelumnya tidak pernah dipertimbangkan. Dalam konteks ini, opini publik yang mendukung visi alternatif dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan dan memberikan dasar untuk mendukung perubahan kebijakan yang tidak dapat dihindari akibat gejolak geopolitik di kawasan. (Han & Rane, 2011)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eulalia Han dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eulalia Han membahas mengenai kebijakan dan resolusi yang dikeluarkan oleh pemerintahan Australia terhadap konflik Israel-Palestina. Sedangkan penulis berfokus kepada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Menangani Konflik Israel-Palestina. Sedangkan

persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eulalia Han dan penulis adalah sama-sama membahas resolusi dan kebijakan dalam menangani konflik Israel-Palestina.

Penelitian terdahulu keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdan Shadiqi, Hamdi Muluk, dan Mirra Noor Milla yang berjudul **“Dukungan untuk Palestina di Kalangan Muslim Indonesia: Identitas Agama dan Solidaritas sebagai Alasan Penandatanganan Petisi Elektronik”**. Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2020, Penelitian ini mengkaji tentang Dukungan terhadap Palestina di Kalangan Umat Islam Indonesia, Penelitian ini berpendapat bahwa identitas agama dan solidaritas dapat menjelaskan aksi solidaritas Palestina yang dilakukan umat Islam di Indonesia. Peneliti berasumsi ada dua alasan mengapa hal ini terjadi konteks penelitian ini adalah isu agama, dan Muslim Indonesia dan Palestina merasakan keterhubungan sebagai sesama Muslim. Kami menyelidiki asumsi ini dengan menggunakan komentar yang mendukung petisi elektronik yang ditandatangani oleh umat Islam Indonesia. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan tindakan kolektif di masa lalu, tidak hanya niat atau sikap dari tindakan kolektif tersebut, seperti pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Peneliti mengidentifikasi lima tema utama yang muncul dari komentar di seluruh petisi elektronik. Kelima tema tersebut adalah kebencian sebagai emosi negatif, identitas agama, pelanggaran moral, kemerdekaan Palestina, dan solidaritas. Bagian ini menyajikan hasil analisis isi petisi elektronik dan membahas keterkaitan antara tema-tema pengkodean utama. Pertama, peneliti menemukan bahwa dua dari 25 petisi elektronik mendapat banyak dukungan dan komentar. (Shadiqi et al., 2020)

Tujuan dari petisi elektronik ini adalah (1) untuk membebaskan dan menghilangkan kekerasan di Palestina, dan (2) menanggapi pidato Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kedua, analisis matriks pengkodean menunjukkan adanya hubungan antara identitas agama dan solidaritas, serta antara pelanggaran moral dan isu kemerdekaan Palestina. Pasangan ini muncul karena (1) adanya empat tema pengkodean (kemerdekaan Palestina, pelanggaran moral, solidaritas, dan identitas agama) yang sering disebutkan dalam komentar; (2) Hasil analisis frekuensi kata menunjukkan lima kata yang sering muncul (kolonialisme, Muslim, saudara, kemerdekaan, tanah air) dikaitkan dengan hasil matriks antar simbol (Shadiqi et al., 2020)

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa penandatanganan petisi elektronik merupakan tindakan kolektif yang berfokus pada suatu tujuan yang dapat diubah oleh orang atau organisasi yang menggerakkannya. Tindakan kolektif cenderung terstruktur, sedangkan perilaku kolektif sebaliknya kurang terstruktur dan dapat terjadi secara spontan. Organisasi-organisasi yang membentuk P1 fokus pada isu-isu kemanusiaan di Indonesia; Sebagai sebuah kelompok, lebih mudah bagi mereka untuk memobilisasi anggotanya dan simpatisan lainnya untuk menandatangani petisi elektronik dibandingkan dengan pemrakarsa individu. Tujuan petisi elektronik ini selaras dengan tujuan organisasi. Misalnya saja Amnesty International Indonesia yang membuat petisi mengenai isu kekerasan di Palestina. Resolusi tersebut meminta pemerintah nasional dan internasional untuk mengatur kebijakan ekonomi dengan Israel, menghentikan kekerasan di Palestina, dan mendukung kemerdekaan Palestina (Shadiqi et al., 2020)

Dalam konteks perkotaan, aksi kolektif dapat berbentuk protes atau demonstrasi, dimana masyarakat turun ke jalan. Di Internet, masyarakat dapat berpartisipasi dalam aksi kolektif online seperti menandatangani petisi elektronik. Misalnya, umat Islam Indonesia telah menyatakan dukungannya terhadap Palestina dengan menandatangani berbagai petisi elektronik. Dengan menganalisis isi komentar elektronik pada petisi tersebut, kami menemukan dua alasan utama dukungan bagi para penandatangan petisi: (1) kesamaan identitas agama antara masyarakat Indonesia dan Palestina serta rasa solidaritas yang terkait dengannya dan (2) keyakinan bahwa Israel memiliki hak yang sama. melanggar standar moral dalam menghalangi kemerdekaan Palestina. Selain itu, aksi kolektif yang diprakarsai oleh kelompok atau organisasi mendapat dukungan lebih besar dibandingkan yang diprakarsai oleh individu. Hal ini menandakan bahwa elemen penting dalam aksi kolektif adalah hadirnya organisasi yang memiliki reputasi baik sebagai pemrakarsa (Shadiqi et al., 2020)

Hasil penelitian ini berkaitan dengan dua konteks, yaitu konteks konflik Palestina-Israel dan konteks umat Islam sebagai kelompok agama mayoritas di Indonesia. Konteks yang berbeda cenderung menghasilkan dinamika alasan yang berbeda untuk mendukung petisi elektronik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menelusuri apakah faktor-faktor yang muncul dalam penelitian ini relevan dalam konteks lain, misalnya dengan agama lain atau kelompok minoritas. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat lebih cenderung terlibat dalam aksi online, misalnya menandatangani petisi elektronik, jika faktor identitas, solidaritas dan moralitas menjadi hal yang menonjol dalam aksi kolektif. Implikasi

praktisnya bagi organisasi yang membuat petisi elektronik adalah mereka harus memperoleh faktor identitas, solidaritas, dan moralitas untuk meningkatkan dukungan (Shadiqi et al., 2020)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hamdi Muluk dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan Hamdi Muluk lebih berfokus membahas resolusi dan dukungan masyarakat Indonesia dan Amnesty International Indonesia terhadap Palestina. Sedangkan penulis berfokus pada resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam menangani konflik Israel-Palestina. Sedangkan persamaan peneliti Hamdi Muluk dan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai dukungan dan resolusi demi terciptanya perdamaian di Palestina dan konflik Israel-Palestina ini dapat terselesaikan.

Penelitian terdahulu kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sarai B. Aharoni, yang berjudul **“Siapa yang membutuhkan Hipotesis Perempuan dan Perdamaian? Memikirkan kembali cara-cara penyelidikan tentang gender dan konflik di Israel/Palestina”** penelitian ini di terbitkan pada tahun 2016 sebagai “International Feminist Journal of Politics” Penelitian ini berfokus pada Hipotesis Perempuan dan Perdamaian (WPH) berdasarkan bukti yang diperoleh dari penelitian longitudinal dan analisis multilevel mengenai berbagai keterlibatan perempuan dalam persoalan perdamaian sebagai warga Negara atau warga sipil dalam aktivis perdamaian, dan negosiator perdamaian di Israel-Palestina.

Penelitian ini menjelaskan bahwa WPH harus diperlakukan sebagai konstruksi rapuh yang dibentuk oleh keadaan kontekstual dan bukan sebagai fakta ilmiah tentang perbedaan jenis kelamin. Misalnya, survei yang dilakukan oleh

Karen Bronius (2014), mengenai pendekatan perempuan Rwanda terhadap perdamaian dua belas tahun setelah proses perdamaian, menemukan bahwa sikap perempuan jauh lebih negatif dibandingkan laki-laki dalam tiga isu utama: kepercayaan; tinggal bersama; dan proses kebenaran/rekonsiliasi. (Aharoni, 2017)

Analisisnya menunjukkan bahwa sikap perempuan pasca-konflik terhadap perdamaian berkaitan erat dengan kesejahteraan pribadi mereka serta tingkat dan jenis kekerasan yang mereka alami selama perang. Karena dalam perang-perang yang terjadi baru-baru ini (perang saudara, perang gerilya, terorisme, pendudukan) perempuan telah mengalami berbagai bentuk kekerasan yang tidak mematikan, termasuk kekerasan seksual, temuan-temuan ini mungkin menyiratkan bahwa jenis-jenis perang dan beban psikologis yang dibebankan pada perempuan/laki-laki adalah faktor utama dalam perang. Menentukan pandangan dan sikap jangka panjang mereka terhadap perdamaian di belahan dunia lain. (Aharoni, 2017)

Namun, survei opini tradisional di Israel/Palestina secara konsisten menunjukkan bahwa variabel gender relatif tidak penting. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, di mana survei longitudinal menunjukkan bahwa perempuan kurang mendukung penggunaan kekuatan militer dan cenderung lebih menyukai kebijakan luar negeri yang didasarkan pada penyelesaian yang dinegosiasikan dibandingkan laki-laki. (Aharoni, 2017)

Membutuhkan Hipotesis Perempuan dan Perdamaian Mereka yang mengunjungi, atau tinggal di komunitas-komunitas yang berada dalam konflik yang mengetahui daya tarik langsung dan dampak kuat dari konstruksi kekuatan feminin yang dibayangkan ini terhadap tindakan dan persepsi diri perempuan

selama dan setelah konflik bersenjata. Terlepas dari sejarah Israel/Palestina yang penuh darah dan masa kini yang suram, perempuan masih terpesona oleh resep mitos tentang “kejatuhan, kebangkitan, dan penebusan.” Ketika kata-kata ini ditulis, “perempuan” masih melakukan dan dengan terampil melakukan, berdasarkan pilihan atau visi, peran sebagai jiwa yang damai atau pembangkang yang marah baik secara strategis maupun naif. (Aharoni, 2017)

Mereka melakukannya untuk mendapatkan suara, visibilitas, sumber daya, dan legitimasi. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh perubahan dan pergeseran pemahaman mengenai peran perempuan dalam konflik, kita harus selalu terlibat dalam diskusi tentang bagaimana praktik-praktik ini menciptakan bentuk-bentuk baru segregasi berbasis gender, memperkuat stereotip esensialis atau mereproduksi hierarki kekuasaan dan otoritas global. keahlian. Dengan meningkatnya perhatian terhadap perempuan di zona konflik, perbincangan mengenai hal ini tetap penting. (Aharoni, 2017)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sarai B. Aharoni dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sarai B. Aharoni berfokus keterlibatan perempuan dalam persoalan perdamaian sebagai warga negara atau warga sipil dalam aktivis perdamaian, dan negosiator perdamaian di Israel dan Palestina. Sedangkan penulis berfokus kepada keterlibatan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa Dalam Menangani Konflik Israel dan Palestina. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sarai B. Aharoni dan penulis adalah sama-sama membahas dampak dan sejarah konflik Israel-Palestina.

Penelitian terdahulu Keenam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aide Esu, yang berjudul **“Kekerasan dan Pembangunan Negara dalam Konteks Konflik Perbatasan: Sebuah Studi tentang Konflik Israel-Palestina”** Penelitian ini di terbitkan pada tahun 2015 sebagai *“Journal of Intervention and Statebuilding”* Penelitian ini berfokus pada kekerasan dan Pembangunan Negara dalam Konteks Konflik Perbatasan: Kajian Terhadap Konflik Israel-Palestina yang mana Kekerasan dapat dipahami dan didefinisikan sebagai sesuatu yang objektif, pada kenyataannya merupakan fenomena subjektif yang mempunyai berbagai bentuk (politis, fisik, dan psikologis). Dari perspektif konstruktivis, identifikasi kekerasan bergantung pada konflik untuk menandakan tindakan tersebut sah; dalam konflik Israel-Palestina, pengalaman berbagai bentuk kekerasan berarti bahwa kekerasan mempunyai banyak makna. Kekerasan ini sah baik dari sudut pandang Israel maupun Palestina, dan hal ini menciptakan serta memenuhi siklus yang melanggengkan konflik yang tidak dapat diselesaikan.

Penelitian terdahulu ini membahas dampak akibat serangan bom di Gaza dan Tepi Barat, atau serangan bunuh diri di Tel Aviv dan Yerusalem, cenderung mendominasi imajinasi konflik IsraelPalestina. Namun yang mendasari representasi tersebut adalah banyaknya proses pembentukan negara yang kompleks, yang seiring berjalannya waktu, telah memunculkan berbagai bentuk kekerasan yang menjadi ciri khas konflik yang berkepanjangan. Bagi Israel dan Palestina, hak untuk hidup merupakan alasan mendasar perjuangan mereka; bagi kedua belah pihak, penggunaan kekuatan dan tindakan pertahanan melambangkan kewajiban moral terhadap negara mereka. Pada tahapan yang berbeda, dan bagi

kedua kelompok, kekerasan telah mengambil bentuk aksi revolusioner yang didorong oleh wacana nasionalis. (Esu, 2016)

Penelitian ini juga membahas tiga tahapan sejarah utama yang telah memicu dan membentuk berlanjutnya kekerasan dan proses pembentukan negara. Tahap pertama, yang tumpang tindih dengan Mandat Inggris, melambungkan sistem klasik pra-negara di Israel dan Palestina. Badan-badan pionir Zionis yang terinspirasi oleh semangat nasionalis berkomitmen untuk memperluas permukiman mereka melalui jalur hukum dalam hal ini dengan membeli tanah dari warga Arab setempat. Mereka kemudian mulai membentuk embrio badan-badan negara. Pada saat itu, Palestina merupakan campuran dari masyarakat pedesaan yang luas berdasarkan oligarki agraria dan elit perkotaan yang terdiri dari tuan tanah dan intelektual yang terlibat dalam menumbuhkan wacana embrio nasionalis. (Esu, 2016)

Tahapan kedua pasca-1948 memperlihatkan kesenjangan mendasar: gerakan Zionis mampu mengkonsolidasikan impian negara-bangsa Israel menyusul penolakan perbatasan Garis Hijau oleh Palestina, memaksakan perbatasan yang diperebutkan melalui tindakan sepihak. Akibat Al- Nakba , warga Palestina memutuskan hubungan dengan tanah mereka: 'Israel menguasai wilayah kedaulatan dan warga Palestina tetap tidak memiliki kewarganegaraan. Hubungan terbalik antara dua bangsa di tanah yang sama mempunyai implikasi yang mendalam, dan dua proses utama menjadi jelas: proses pembentukan negara bagi Israel dan kondisi terbatas bagi Palestina. (Esu, 2016)

Hasil perang tahun 1967 menandai tahap ketiga perkembangan sejarah. Pendudukan wilayah di luar Garis Hijau mendorong transformasi negara-bangsa

Israel menjadi negara ganda dalam hal jumlah penduduk, menyebabkan kembalinya istilah primordial-religius. Organisasi Pembebasan Palestina menghadirkan front kepemimpinan terpadu sebagai satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina dan mendorong 'pemberdayaan di arena Internasional dengan penerimaan implisit atas sebagian, bukan seluruh wilayah Palestina. Pada tahap ini, sifat kekerasan berubah. Di Wilayah Pendudukan, praktik peperangan beralih ke peningkatan kekuasaan militer dengan intensitas rendah dan kombinasi agresi dan pengabaian terhadap hukum internasional. (Esu, 2016)

Seiring berjalannya waktu, pendudukan militer oleh IDF di Tepi Barat dan Gaza, munculnya perlawanan dan aksi non-kekerasan (Intifada) serta praktik teroris atas nama Jihad di wilayah Israel, telah mengakibatkan meningkatnya polarisasi dan konflik. radikalisasi konflik. Tindakan-tindakan tersebut menghasilkan pola aksi-balas dendam dan menimbulkan kebencian dan penyangkalan timbal balik, yang menaburkan benih-benih konflik yang tidak terselesaikan dan berfungsi sebagai alasan untuk mempertahankan wacana kekerasan yang sah terhadap 'musuh'. (Esu, 2016)

Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa konflik yang berkepanjangan telah membuat proses pembentukan negara Palestina menjadi unik dan berfluktuasi antara masa perang dan masa damai. Oleh karena itu, pembentukan negara di wilayah geografis yang diperebutkan ini telah melalui beberapa tahap yang berbeda. Semakin jelas bahwa kekerasan yang melekat pada pembentukan negara Palestina telah memicu antagonisme internal dan eksternal yang menghambat pembentukan negara yang sebenarnya. Bahkan hingga saat ini, Palestina masih merupakan

sebuah negara semu karena berbagai badan yang muncul tidak mampu menegakkan monopoli kekuasaan yang sah. (Esu, 2016)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aide Esu dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aide Esu berfokus pada kekerasan dan pembangunan negara dalam Konflik Israel-Palestina Sedangkan penulis berfokus kepada resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa Dalam Menangani Konflik Israel dan Palestina. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aide Es dan penulis adalah sama-sama membahas dampak yang ditimbulkan konflik Israel-Palestina.

Penelitian terdahulu ketujuh yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suzan Alkalliny yang berjudul **“Pembingkaian Pemberitaan Konflik Palestina-Israel di CNN dan FoxNews”** penelitian ini di terbitkan pada tahun 2017 sebagai “International Journal of English Literature and Social Sciences”. Penelitian ini menjelaskan penggunaan media, khususnya televisi, merupakan titik penting dalam sejarah peristiwa penting dan perang terkini. Liputan media mengenai peristiwa dan perang seperti ini membawa penonton ke inti peristiwa dan berdampak langsung pada opini publik internasional. Misalnya, banyak kritik ditujukan kepada media Amerika terkait pemberitaan agresi Israel di Gaza. Banyak demonstrasi menentang dua jaringan terbesar di Amerika Serikat, CNN dan FOXNEWS, juga terjadi di New York City untuk memprotes pemberitaan media yang bias mengenai Palestina dan agresi Israel terhadap Gaza.

Penelitian terdahulu ini membahas awal agresi Israel pada 8 Juli 2014 dan berlangsung selama 51 hari, yang menewaskan 2.322 warga Palestina dan melukai

ribuan lainnya, media Arab dan asing berlomba-lomba meliput peristiwa tersebut dan perkembangannya secara berturut-turut. Jaringan berita besar juga telah mengirimkan delegasi dan korespondennya ke Jalur Gaza untuk menyiarkan secara cepat peristiwa konflik tersebut. Sebagian besar kritik ditujukan kepada media Amerika terkait pemberitaan agresi Israel di Gaza. Banyak demonstrasi menentang dua jaringan Amerika terbesar di Amerika Serikat, CNN dan FOX News di New York, juga diadakan sebagai protes terhadap pemberitaan media yang bias terhadap Palestina. Para demonstran melontarkan sejumlah sorak-sorai yang mengecam bias pemberitaan media di jaringan Amerika CNN dan FOX News. (Alkalliny, 2017)

Hasil penelitian berisi liputan media mengenai konflik Palestina-Israel di Gaza pada tahun 2014 bervariasi antara CNN dan FOX News. CNN tampak lebih bersimpati kepada Israel, dengan fokus pada liputan roket yang ditembakkan dari Gaza dan sama sekali mengabaikan aliran roket Israel yang menghancurkan ratusan situs Palestina. Kajian tersebut juga melaporkan dalam pemberitaan antara kemampuan militer tentara Israel dengan kemampuan perlawanan Palestina. Liputan tersebut tampak bias dan tidak obyektif karena sangat bergantung pada sumber-sumber Israel dibandingkan dengan sumber-sumber Palestina selama minggu pertama peristiwa tersebut ketika 54 tokoh Israel muncul berbeda dengan 25 tokoh Palestina dari Hamas atau PLO. (Alkalliny, 2017)

Mengenai FOX News, mereka menunjukkan dukungan moral dalam liputan medianya mengenai agresi Israel di Gaza untuk Israel dan menunjukkan sikap anti-Arab. Liputan media FOX News menunjukkan dukungan penuh terhadap Israel. Manifestasi bias yang paling penting adalah pernyataan yang dibuat oleh Menteri

Luar Negeri AS John Kerry di saluran tersebut, di mana tentara Israel terbunuh dan hak Israel untuk mempertahankan diri dari roket Gaza ditegaskan. Saluran tersebut juga menampilkan serangkaian gambar bangunan yang hancur di Gaza berada di Israel, yang merupakan penipuan bagi pemirsanya.

CNN dan FOX News memfokuskan liputan mereka mengenai peristiwa konflik Gaza pada tahun 2014 dengan menyoroti konflik tersebut sebagai konflik etnis agama dan bukan konflik darat. Konflik tersebut digambarkan sebagai konflik antara kelompok Islam militan Hamas dan Israel. Saluran tersebut selalu menggunakan istilah "Muslim Ekstremis Militan". (Alkalliny, 2017)

Penelitian ini menunjukkan bahwa CNN dan FOX News menganggap peristiwa Gaza 2014 sebagai peristiwa yang negatif dan bias. CNN mengandalkan kerangka konflik dan tanggung jawab sementara FOX News mengandalkan kerangka konflik dan konsekuensi ekonomi, sedangkan kedua saluran tersebut sepenuhnya menyimpang dari kerangka kemanusiaan dan moral dalam konflik secara umum dan mendominasi liputan negatif mengenai perlakuan media terhadap konflik. peristiwa Gaza di saluran penelitian. Kedua saluran tersebut turut serta memuji kebijakan Amerika Serikat sebagai faktor kuat dalam menyelesaikan krisis konflik antara Palestina dan Israel pada peristiwa Gaza 2014. (Alkalliny, 2017)

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Suzan Alkalliny dan penulis yaitu penelitian yang dilakukan oleh Suzan Alkalliny berfokus membahas mengenai penggunaan media CNN dan Fox News dalam menyampaikan berita mengenai konflik Israel-Palestina. Sedangkan penulis berfokus kepada keterlibatan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa dalam Menagani Konflik Israel dan

Palestina. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Suzan Alkalliny dan penulis adalah sama-sama membahas dampak konflik Israel-Palestina dan dampak konflik israel-palestina.

2.2.Kerangka Teoritis

Peneliti akan menggunakan teori Resolusi konflik, serta menggunakan konsep Organisasi Internasional dan konsep Efektivitas Rezim. Dalam membantu penelitian, peneliti menilai bahwa teori dan konsep ini akan cocok dengan pembahasan yang peneliti coba teliti yaitu Efektivitas Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-bangsa dalam konflik Israel-Palestina.

2.2.1. Rezim Internasional

Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar pengaturan sementara yang berubah seiring dengan pergantian kekuasaan atau kepentingan. Keohane mencatat bahwa perbedaan analitik dasar harus dibuat antara rezim dan perjanjian. Tujuan dari rezim adalah untuk memfasilitasi perjanjian. Demikian pula, Jervis berpendapat bahwa konsep rezim "menyiratkan tidak hanya norma dan harapan yang memfasilitasi kerja sama, tetapi juga suatu bentuk kerja sama yang lebih dari sekadar mengikuti kepentingan pribadi jangka pendek. (Kresner, 1983)

Stephen D Kresner dalam tulisannya yang berjudul *Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables* mendefinisikan rezim internasional merupakan satu set produk yang di dalamnya berisikan prinsip, norma, aturan, dan prosedur dalam mengambil keputusan baik secara implisit (tidak langsung) maupun eksplisit (langsung) dimana harapan para aktor (yang tergabung)

bertemu pada suatu isu hubungan internasional tertentu. Dengan kata lain, aktor yang tergabung dalam suatu kerja sama memiliki harapan agar isu hubungan internasional tertentu dapat diselesaikan dengan adanya satu set produk yang berisikan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. (Kresner, 1983)

Sederhananya dari definisi tersebut, rezim internasional terdiri dari elemen-elemen di dalamnya antara lain;

- Aktor merupakan negara yang tergabung di dalam kerja sama internasional.
- Isu atau fenomena merupakan suatu permasalahan ataupun tantangan yang berusaha diatasi oleh negara-negara atau Sebagian negara di dunia.
- Prinsip merupakan keyakinan negara terhadap fakta, sebab-akibat, dan kejujuran.
- Norma merupakan standar perilaku pada hak dan kewajiban suatu negara.
- Aturan merupakan pedoman atas tindakan suatu negara.
- Prosedur pengambilan keputusan merupakan metode yang berlaku dalam tindakan pengambilan keputusan secara kolektif.

Perilaku yang diatur oleh rezim tidak boleh hanya didasarkan pada perhitungan kepentingan jangka pendek. Karena rezim mencakup prinsip-prinsip dan norma-norma, fungsi utilitas yang dimaksimalkan harus mewujudkan suatu kewajiban umum. Salah satu prinsip tersebut, yaitu timbal balik, ditekankan dalam analisis Jervis tentang rezim keamanan. Ketika negara menerima timbal balik, mereka akan mengorbankan kepentingan jangka pendek dengan harapan bahwa

aktor-aktor lain akan membalasnya di masa depan, meskipun mereka tidak memiliki kewajiban khusus untuk melakukannya. (Kresner, 1983)

Rezim ada di semua bidang hubungan internasional, bahkan yang secara tradisional dipandang sebagai contoh nyata dari anarki, seperti persaingan kekuatan besar. Negarawan hampir selalu menganggap diri mereka dibatasi oleh prinsip-prinsip, norma-norma, dan aturan-aturan yang mengatur dan melarang berbagai macam perilaku. " Pentingnya rezim internasional menurut pandangan Krasner dapat dilihat dalam fungsinya untuk mengurangi anarki di dunia internasional dan memberikan landasan untuk koordinasi dan kerjasama. Konsep ini dapat ditemukan dalam bukunya Krasner yang membahas bagaimana negara-negara sering kali tunduk pada aturan dan norma internasional meskipun mereka vokal dalam menegaskan kedaulatan mereka. (Kresner, 1983)

Dalam dunia yang terdiri dari negara-negara berdaulat, fungsi dasar rezim adalah untuk mengkoordinasikan perilaku negara untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam bidang-bidang isu tertentu. Koordinasi semacam itu menarik dalam beberapa keadaan. Stein dan Keohane menyatakan bahwa rezim dapat memiliki dampak ketika hasil optimal Pareto tidak dapat dicapai melalui perhitungan individu yang tidak terkoordinasi atas kepentingan pribadi. Pentingnya rezim internasional menurut Krasner juga terkait dengan cara rezim ini dapat memengaruhi pembentukan kebijakan domestik dan perilaku negara. Dengan adanya rezim, negara-negara dapat merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi dalam kerjasama dan mengurangi risiko terjadinya konflik. (Kresner, 1983)

Teori yang dikemukakan oleh Stephen D Kresner menggambarkan bahwasanya rezim internasional hadir sebagai upaya kolektif dari negara-negara di dunia untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan serta tantangan yang mengancam bagi negara-negara atau sebagian negara di dunia. Teori ini bertujuan untuk menggambarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai suatu rezim internasional yang dapat mengatasi konflik Israel-Palestina.

2.2.2. Konsep Efektivitas Rezim (*The Concept of Regime Effectiveness*)

Ketika melihat rezim, ada upaya untuk membangun dan mengimplementasikan kerja sama. Namun masalahnya adalah tingkat keberhasilan atau implementasi rezim bervariasi, dan ada rezim yang dapat dianggap berhasil atau tidak berhasil. Alasannya ada dua, yang *pertama* adalah sifat dari masalah itu sendiri, beberapa masalah tidak terlalu rumit secara intelektual atau politis dibandingkan dengan masalah lainnya, dan oleh karena itu lebih mudah dipecahkan. Yang *kedua* berpusat pada kemampuan untuk memecahkan masalah: Beberapa upaya lebih berhasil daripada yang lain karena penggunaan perangkat kelembagaan yang lebih kuat atau keterampilan dan energi yang lebih besar untuk menyelesaikan masalah. (Underdal, 2002)

Menurut Underdahl, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keefektifitasan sebuah rezim dapat dilihat dari sejauh mana rezim tersebut mampu menyelesaikan sebuah isu atau permasalahan dan menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan awal pembentukan rezim tersebut untuk mencapai "solusi optimal". Untuk mengukur efektivitas kolaborasi atau kerjasama, Underdahl mengenalkan 2 jenis variabel yang mempengaruhi efektivitas rezim kolaborasi.

Pertama, variabel dependen, yaitu efektivitas suatu rezim. *Kedua*, variabel independen, yang terdiri dari jenis isu atau permasalahan dan kemampuan rezim kolaborasi untuk mengatasi isu dan masalah tersebut. (Underdal, 2002)

1. Variabel Dependen

Dalam konsep Underdahl, variabel dependen di sini adalah efektivitas rezim, yang dapat diukur dengan menggunakan tiga aspek yang diideal, yaitu output, outcome, dan impact dari sistem.

Pertama Output, Output adalah serangkaian peraturan atau kebijakan yang disepakati dan ditetapkan oleh para anggota yang berpartisipasi dalam kerja sama. Secara sederhana, output adalah sebuah hasil dari kesepakatan, biasanya berupa ketentuan atau kebijakan dengan tujuan untuk memandu aktivitas negara-negara yang berpartisipasi dalam kerja sama. *Kedua Outcome* Underdahl mendefinisikan outcome sebagai perilaku yang berubah dari para aktor yang terlibat ketika dihadapkan pada kebijakan yang telah disepakati bersama dalam kerja sama. Salah satu indikator adanya *outcome* adalah dengan melihat apakah ada penyesuaian perilaku antar negara akibat kebijakan yang telah disepakati bersama atau berhubungan dengan perubahan perilaku anggota rezim. Dalam hal ini, jika kebijakan yang diambil oleh rezim efektif, maka akan menyebabkan perubahan perilaku anggota rezim dan sebaliknya. *Ketiga Impact*, Impact atau dampak adalah aspek yang mengarah pada efek atau pengaruh yang dihasilkan oleh suatu rezim kolaborasi atau kerjasama tertentu, baik itu berdampak positif maupun negatif terhadap masalah yang menjadi latar belakang terbentuknya rezim tersebut. (Underdal, 2002)

Untuk mencapai rezim yang efektif, perlu diperhatikan tingkat kerjasama dalam berkolaborasi. Karena dipengaruhi oleh isu yang berbahaya dan kemampuan untuk menyelesaikan isu tersebut. (Underdal, 2002)

2. Variabel Independen

Underdahl membagi variabel independen yang dapat mempengaruhi efektivitas rezim kolaborasi menjadi dua bagian. Underdahl menjelaskan bahwa kompleksitas masalah dan kemampuan untuk menyelesaikannya merupakan serangkaian hal yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi.

1. Level of Collaboration (Tingkat Kolaborasi)

Dalam mengukur tingkat kerjasama atau kolaborasi untuk dapat menentukan efektivitas sebuah rezim, efektivitas sebuah rezim dapat diinterpretasikan dengan menggunakan *Stringency* (kekuatan aturan), *Compliance* (ketaatan anggota rezim terhadap aturan), dan *Impact* (sebagai efek samping yang dihasilkan dari sistem tersebut). Oleh karena itu, dalam menentukan efektivitas suatu rezim, perlu dilakukan analisis terhadap output, outcome, dan impact atau dampak dari rezim internasional tersebut. (Underdal, 2002)

Berkaitan dengan isu dalam penelitian ini, *output* adalah produk yang dihasilkan oleh rezim dalam bentuk aturan tertulis dan tidak tertulis seperti resolusi, deklarasi, konvensi, norma hukum, perjanjian, aturan, prinsip, dan lain-lain. Sementara itu, *outcome* berkaitan dengan perubahan perilaku anggota rezim. Dalam hal ini, jika kebijakan yang ditetapkan oleh rezim efektif, maka akan menyebabkan perubahan perilaku anggota rezim dan

sebaliknya. Terakhir, pengaruh (*impact*) berkaitan dengan terciptanya situasi tertentu yang diinginkan atau dirancang oleh sebuah rezim sebagai bentuk respon dari anggotanya terhadap rezim itu sendiri. (Underdal, 2002)

Dari sudut pandang Underdal, tingkat kerja sama rezim kemudian dapat diukur dalam kaitannya dengan skala ordinal. Ada 6 tingkat skala ordinal yang mana skala ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kerja sama rezim. Skala ini yaitu: (Underdal, 2002)

- 0 Permusyawaratan bersama namun tidak ada aksi bersama.
- 1 Koordinasi tindakan berdasarkan pemahaman diam-diam.
- 2 Koordinasi tindakan berdasarkan peraturan atau standar yang dirumuskan secara eksplisit, namun penerapannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional. Tidak ada penilaian terpusat terhadap efektivitas upaya-upaya yang dilakukan.
- 3 Sama seperti level 2 tetapi termasuk penilaian terpusat.
- 4 Perencanaan yang terkoordinasi dikombinasikan dengan implementasi nasional saja. Termasuk penilaian efektivitas yang terpusat.
- 5 Koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi penuh, dengan penilaian efektivitas yang terpusat.

2. *Problem Malignancy* (Kerumitan Permasalahan)

Underdahl mengkategorikan masalah ke dalam dua jenis: masalah yang bersifat *benign* atau ringan dan *maligh* atau rumit. Semakin rumit dan kompleks suatu masalah, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk menemukan solusinya. Yang membedakan kedua jenis masalah ini adalah

masalah *benign* ditandai dengan adanya kepentingan yang sama atau identik di antara para aktor yang terlibat. Semakin berbeda kepentingan para aktor yang terlibat, maka semakin rumit dan kompleks pula permasalahan yang terjadi. Dalam kondisi seperti ini, akan sulit untuk mencapai efektivitas kolaborasi yang efektif. (Underdal, 2002)

Underdahl mengategorikan kompleksitas masalah ke dalam 4 bagian. *Pertama Incongruity* bias atau subjektivitas di antara negara-negara anggota rezim, yang masing-masing memiliki perbedaan pemahaman tentang isu-isu yang dihadapi. *Kedua Asymmetry* masalah asimetris adalah ketika pihak-pihak yang terlibat dalam rezim kolaboratif atau kerjasama memiliki kepentingan dan nilai yang tidak searah. Semakin asimetris masalahnya, semakin sulit untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. *Ketiga Cummulative Cleavages* situasi ketika pihak-pihak yang terlibat dalam suatu rezim kerja sama berada dalam atau menghadapi situasi yang sama atau akumulasi perbedaan, baik dalam bentuk perbedaan kepentingan, pemahaman, perspektif, atau perbedaan lain yang dihadapi oleh setiap anggota rezim. (Underdal, 2002)

Untuk menentukan hal tersebut juga perlu adanya ukuran sebagai parameter. Dengan kata lain sebelum menentukan karakteristik permasalahan *benign* atau *malign* perlu mengukur hal tersebut dengan *collective optimum*. (Underdal, 2002)

Collective optimum merupakan salah satu alat ukur untuk melihat adanya perubahan perilaku dari negara anggota yang nantinya akan menentukan arah

permasalahan tersebut benign atau malign. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan perilaku negara dalam dua dimensi. Pertama, keadaan negara ketika rezim hadir sebagai suatu solusi permasalahan. Adanya perubahan atau improvisasi dari negara, tinggi atau rendah. Dan kedua, dapat dilihat dari bagus (*good*) atau idealnya (*ideal*) solusi rezim untuk diadopsi oleh negara anggota. Perbedaan bagus atau ideal juga diartikan oleh Underdal sebagai *satisficing* dan *maximizing*. Artinya aturan yang diberikan oleh rezim dapat dipandang berbeda bagi negara dan hal tersebut memengaruhi efektif atau tidaknya suatu rezim. (Underdal, 2002)

Collective optimum ini nantinya dapat melihat negara anggota menyikapi aturan serta regulasi dari rezim sesuai atau tidaknya dengan kepentingan masing-masing negara yang nantinya akan memengaruhi karakteristik permasalahan benign atau malign. Semakin banyak negara anggota yang berada pada ukuran *High-Small* maka akan semakin *benign* suatu karakteristik permasalahan dan semakin banyak *Low-Great* maka akan semakin malign suatu permasalahan. (Underdal, 2002)

3. *Problem Solving Capacity* (Kapasitas Penyelesaian Permasalahan)

Pada hal ini, Underdahl menjelaskan bahwa kapasitas pemecahan masalah akan lebih efektif jika isu-isu ditangani melalui sistem dan institusi yang lebih matang dan mapan karena latar belakang institusi yang kuat dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar. Ketika solusi yang dihasilkan melalui keputusan kolektif, kapasitas pemecahan masalah dapat dipahami melalui tiga elemen. (Underdal, 2002)

Pertama The institutional setting penjelasan mengenai institusi ini merujuk pada sebuah rezim yang berperan sebagai pihak yang mendefinisikan praktik-praktik sosial, membentuk aturan dan norma, serta memandu interaksi atau komunikasi di antara para anggota yang terlibat. (Underdal, 2002)

Kedua Distribution of Power Pada bagian ini, jika kita mengartikan distribusi kekuasaan sebagai distribusi kekuasaan di antara para aktor yang tergabung dalam sistem kerjasama. Underdahl menjelaskan dalam bukunya bahwa distribusi kekuasaan dapat dilihat ketika pihak yang memiliki kekuasaan paling besar tidak menyalahgunakan kekuasaannya, melainkan menggunakan kekuasaannya untuk menjadi pemimpin dalam rezim kerjasama. Lalu, pembagian kekuasaan dapat dilihat ketika anggota yang tidak dominan mampu mengendalikan anggota yang memiliki kekuasaan lebih. Underdahl menambahkan bahwa ketika ada pihak yang dominan dalam sebuah rezim, maka hal tersebut dianggap sebagai dominasi. (Underdal, 2002)

2.3. Asumsi

Berdasarkan pemaparan diatas, termasuk latar belakang, identifikasi masalah dan teori-teori yang dikemukakan, maka penulis memiliki asumsi sementara yang perlu diuji kebenarannya. Dengan ini penulis memiliki asumsi sebagai berikut :

“Keefektivitasan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa masih bernilai 0 (nol), hal ini dapat dilihat dari banyaknya resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, namun kenyataannya dari sekian banyaknya resolusi yang

dikeluarkan Dewan Keamanan PBB tersebut, konflik Israel-Palestina masih masih terus berlanjut dan belum terselesaian sampai saat ini dan juga dibuktikan dengan ketidakmampuan Dewan Keamanan PBB untuk mengorganisir negara-negara anggotanya dan negara-negara yang bertikai untuk mematuhi dan menindaklanjuti resolusi Dewan Keamanan PBB yang sudah diadopsi yang berkaitan dengan penyelesaian konflik Israel-Palestina.”

2.4. Kerangka Analisis

